

Faktor Determinan Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2022

Suci Ramadhani¹, Salwa Riyanti², Alya Nisa³, Aurellia³,
Dyah Nur Arlina⁴, Lisa Dwijaya Kusuma⁵, Nanang Martono⁶
Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto, Indonesia

¹suci.r@mhs.unsoed.ac.id, ²salwa.riyanti@mhs.unsoed.ac.id, ³alya.aurellia@mhs.unsoed.ac.id,
⁴dyah.arlina@mhs.unsoed.ac.id, ⁵lisa.kusuma@mhs.unsoed.ac.id,
⁶nanang.martono@unsoed.ac.id

Abstrak: Kriminalitas di Indonesia meningkat, dengan laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan 133.484 kasus pada 2021-2022; ini berbanding terbalik dengan penurunan tahun sebelumnya. Faktor utama penyebabnya adalah kondisi ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan pendapatan dan kepadatan penduduk juga berkontribusi, mendorong individu melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara faktor sosial dan tingkat kriminalitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder kuantitatif dengan menggunakan data kemiskinan, rata-rata pendapatan, pengangguran kepadatan penduduk, kriminalitas dari data BPS tahun 2022. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Sampel penelitian ini adalah data dari 34 provinsi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan kepadatan penduduk berhubungan positif dengan jumlah kriminalitas, sementara kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran tidak berhubungan secara signifikan. Provinsi dengan kriminalitas tertinggi adalah Jawa Timur, sedangkan terendah di Maluku Utara. Kemiskinan dipengaruhi akses pendidikan dan kesempatan kerja yang rendah. Penelitian juga menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berhubungan positif dengan tingkat kriminalitas, sedangkan kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran tidak berkorelasi signifikan. Meningkatnya kepadatan penduduk dapat memicu masalah sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kriminalitas. Variabel lain mungkin dipengaruhi faktor kompleks yang tidak langsung memengaruhi tindakan kriminal dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kriminalitas, Kemiskinan, Rata-rata Pendapatan, Pengangguran, Kepadatan Penduduk

Abstract: Criminality in Indonesia is increasing, with the Badan Pusat Statistik (BPS) report showing 133,484 cases in 2021-2022; this contrasts with the previous year's decline. The main contributing factors are economic conditions, including poverty and unemployment. Income inequality and population density also contribute, driving individuals to commit criminal acts to make ends meet. The method used in this research is quantitative secondary data analysis using data on poverty, average income, unemployment population density, crime from BPS data in 2022. The sample technique

used in this research is total sampling. The sample of this research is data from 34 provinces. The data collection method used is the documentation method which is carried out by collecting various documents. This study analyzes the factors that influence the crime rate in Indonesia in 2022. The results show that population density is positively related to crime, while poverty, average income, and unemployment are not significantly related. The province with the highest crime rate is East Java, while the lowest is North Maluku. Poverty is influenced by low access to education and employment opportunities. Research shows that population density is positively related to crime rates, while poverty, average income, and unemployment are not significantly correlated. Increasing population density may trigger social and economic problems, which in turn increase crime. Other variables may be influenced by complex factors that do not directly affect criminal behavior in society.

Keywords: Crime, Poverty, Average Income, Unemployment, Population Density

Pendahuluan

Kriminalitas merupakan sebuah fenomena yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Tindakan kriminalitas diartikan sebagai suatu tindakan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial (Aprilia, 2022). Susilo dalam Ibraya dan Azis (2023) menjelaskan bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, masyarakat yang berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Menurut Lapebesi dkk., (2021) kriminalitas merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan norma dan aturan di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan dan masalah. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminalitas merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang merugikan orang lain dan dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat. Berdasarkan data yang diper dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2021-2022 kasus kejahatan di Indonesia yang dilaporkan mengalami kenaikan sejumlah 133.484 kasus. Hal ini justru berbanding terbalik di tahun 2020-2021 dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan menurun sebanyak 7.737 kasus. BPS menjelaskan tindak kriminalitas atau kejahatan yang dimaksud adalah segala tindakan yang diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Menurut data Statistik Kriminal 2022 dari BPS (2022b), terdapat 9 klasifikasi kejahatan yang disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* dari PBB, yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015). Kejahatan yang paling tinggi dan mendapatkan hukuman paling berat dalam KUHP Indonesia adalah kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan). Selama periode lima tahun dari 2017-2021, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia relatif menurun. Hanya pada

tahun 2021 jumlah pembunuhan mengalami kenaikan menjadi 927 kejadian. Tiga wilayah dengan jumlah kasus pembunuhan terbanyak pada tahun 2021 adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kasus pembunuhan paling sedikit adalah Maluku Utara, DI Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Utara.

Kejahatan terhadap fisik atau badan (penganiayaan ringan, berat, dan kekerasan dalam rumah tangga) juga cenderung mengalami penurunan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling sering terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa timur. Provinsi yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri atas jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat merupakan provinsi dengan jumlah kasus kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak, sedangkan provinsi dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau.

Klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Bentuk kejahatan ini pada tahun 2021 lebih sering terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Barat, sedangkan di kejahatan ini hampir tidak pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau. Jenis kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Klasifikasi kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi), dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam). Bentuk kejahatan ini sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung, sementara provinsi dengan jumlah kasus ini yang terendah adalah Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Kejahatan hak/milik tanpa penggunaan kekerasan, terdiri atas tindakan pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, perusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah kejahatan ini yang tertinggi. Tiga wilayah dengan jumlah kejadian ini yang paling sedikit adalah Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. Kejahatan terkait narkoba merupakan jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kejahatan ini meliputi kejatan narkotika dan psikotropika. Kejahatan ini sering terjadi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan. Provinsi dengan jumlah kejadian narkotika terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Gorontalo.

Terakhir ada klasifikasi kejahatan di dalamnya ada penipuan, penggelapan, dan korupsi. Provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit. Kejadian kejahatan yang paling banyak terjadi pada kelompok klasifikasi ini adalah kejahatan penipuan.

Jumlah angka kriminalitas di Indonesia dapat disebabkan berbagai faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, kondisi ekonomi sering kali dianggap sebagai penyebab utama kasus-kasus kriminalitas tersebut. Kesulitan ekonomi seperti kemiskinan seringkali menjadi pemicu tindak kejahatan, terutama ketika masyarakat mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut terjadi akibat tingkat pendapatan yang rendah, angka pengangguran tinggi, serta kepadatan penduduk yang tidak terkendali. Berbagai permasalahan tersebut menciptakan tekanan pada masyarakat. Hal ini mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat yang belum mampu teratasi dan terjadi hampir di seluruh negara. Ketidakmampuan sebagian penduduk untuk menyejahterakan hidupnya menyebabkan kemiskinan yang kemudian dapat memicu kriminalitas (Kuciswara dkk, 2021). Individu atau masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, terpaksa melakukan tindakan kriminal dengan melegalkan semua cara yang melanggar norma, demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagian dari mereka yang melakukan tindak kriminal menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Tidak sedikit dari pelaku tindak kriminal melakukan aksinya berulang-ulang (Dulkiah, 2018). Ketimpangan pendapatan di suatu daerah juga akan memperbesar keinginan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal (Edwart & Azhar, 2019). Kecemburuan sosial akibat ketimpangan pendapatan membuat masyarakat memilih melakukan tindak kriminal demi mempertahankan status sosialnya.

Menurut Padilla (2022), beberapa studi dalam sosiologi telah mengidentifikasi bahwa status sosial ekonomi individu dapat menjelaskan perilaku kriminal. Namun, ketika aktivitas ekonomi meningkat, aksi kejahatan juga melonjak di beberapa provinsi, yang artinya bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam aktivitas ekonomi (seperti peningkatan produksi, pendapatan, atau perdagangan), hal ini tidak selalu berdampak positif terhadap penurunan kejahatan. Sebaliknya, di beberapa provinsi justru terlihat bahwa seiring dengan peningkatan ekonomi, tingkat kejahatan juga ikut naik. Ini mungkin terkait dengan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang menyebabkan ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat

yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketika kekayaan atau sumber daya seperti pendidikan dan pekerjaan tidak terdistribusi secara merata di masyarakat, hal ini dapat memicu perasaan tidak adil dan kebencian sosial. Perasaan ini kemudian bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan tingkat kejahatan. Ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat secara tidak langsung mengelompokkan masyarakat dengan penghasilan tinggi dan penghasilan rendah (Mardinsyah & Sukartini, 2020). Rendahnya pendapatan akibat minimnya lapangan pekerjaan, memengaruhi individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Azmi et.al, (2024) kelompok yang memiliki keinginan untuk bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan bekerja, lebih sering merasa tertekan oleh masalah ekonomi, tekanan dalam keluarga, dan kemiskinan. Ketiadaan lapangan pekerjaan yang memadai, membuat banyak orang merasa putus asa dan memilih jalan pintas dengan cara negatif, seperti melakukan tindakan kriminal. Semakin tinggi angka pengangguran di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka kriminalitasnya.

Jika dilihat dari data BPS pada tahun 2022 (BPS, 2024), rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, pada bulan Februari sebesar 5,83% dan pada bulan Agustus sebesar 5,86%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 0,03%, sehingga rata-rata pendapatan provinsi juga menurun. Menurut data yang diperoleh dari BPS tahun 2022, rata-rata upah minimum regional per bulan menurut provinsi sebesar Rp2.725.505,00. Hal ini menyebabkan individu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dengan pendapatan inilah yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Jumlah penduduk di suatu daerah dapat memengaruhi jumlah lapangan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Data kriminalitas tahun 2022, tindak kriminalitas paling sering terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya tingkat kriminalitas di Sumatera Utara pada tahun 2022 berhubungan dengan jumlah penduduk dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Menurut Martauli dkk., (2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dapat diindikasikan bahwa semakin banyak populasi, semakin kompleks masalah sosial yang dihadapi, termasuk kriminalitas. Selain itu Aldawiyah (2024) menyoroti bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di Sumatera Utara berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, menunjukkan adanya hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kriminalitas.

Jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan berbagai permasalahan di masyarakat, sehingga dapat mengganggu sistem sosial yang ada. Sesuai dengan teori kependudukan kontemporer yang digagas Durkheim menjelaskan bahwa

angka penduduk yang tinggi dapat menyebabkan kompetisi antarindividu dalam masyarakat (Sabiq & Nurwanti, 2021). Persaingan yang dimaksud yakni ketika masyarakat akan melakukan apapun demi mempertahankan hidupnya. Apabila masyarakat tidak dapat bersaing dengan baik, maka kemungkinan mereka akan melakukan tindakan kriminal.

Kepadatan penduduk juga berdampak pada penurunan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga dapat menyebabkan masalah, seperti: pengangguran dan ketimpangan pendapatan antara yang bekerja dan tidak bekerja. Kondisi ini akan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminalitas sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Edwart & Azhar, 2019). Berdasarkan penelitian Dari & Asnidar (2022) menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Berdasarkan berbagai teori dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk berperan sebagai salah satu faktor signifikan dalam peningkatan tingkat kriminalitas.

Menurut penelitian Yuzani & Deswina (2024), hasil studi empiris yang dilakukan kepolisian dan institusi akademis di Indonesia bahwa prediktor utama yang memengaruhi tingkat kriminalitas di suatu wilayah adalah tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kesenjangan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan tingkat kepadatan penduduk, tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Menurut penelitian tersebut, terdapat pengaruh antara kondisi sosial masyarakat terhadap tingkat kriminalitas secara signifikan. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kegiatan ilegal yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dapat berkurang ketika pertumbuhan ekonominya stabil dan inklusif, sehingga tekanan ekonominya berkurang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik dapat mengurangi individu untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan properti dan perampokan. Namun, ketegangan sosial dan ketidakadilan dapat disebabkan ketimpangan ekonomi yang tinggi, sehingga memicu peningkatan kejahatan di komunitas tertentu.

Berdasarkan data BPS tentang kriminalitas tahun 2022, provinsi dengan kriminalitas tertinggi yaitu Sumatera Utara (36.534 kejadian), DKI Jakarta (29.103 kejadian), dan Jawa Timur (19.257 kejadian). Sementara itu, provinsi dengan kriminalitas terendah berada pada provinsi Kalimantan Utara (971 kejadian), Maluku Utara (1.008 kejadian), dan Sulawesi barat (1.500 kejadian). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi angka kriminalitas di Jawa Timur, salah satunya adalah pengangguran. Hal tersebut menunjukkan waktu produktif individu yang lebih sedikit daripada sebelumnya dan pengangguran tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor kepadatan penduduk. Kepadatan

penduduk menimbulkan persaingan individu untuk bertahan hidup. Faktor kemiskinan juga menunjukkan adanya ketidakmampuan masyarakat miskin untuk membayar *cost of living* atau biaya kebutuhan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat kepadatan penduduk, dan rata-rata pendapatan memengaruhi tindakan kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022. Meninjau hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, penelitian ini memberikan kebaruan mengenai faktor yang memengaruhi kriminalitas di Indonesia tahun 2022 terutama dari pendekatan ekonomi, sosial, dan kependudukan dengan memasukkan variabel kepadatan penduduk. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji ulang faktor penyebab kasus kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder kuantitatif dengan menggunakan data kemiskinan, rata-rata pendapatan, pengangguran kepadatan penduduk, kriminalitas dari data BPS tahun 2022. Data yang diolah dan dianalisis berupa variabel kemiskinan (X1); rata-rata pendapatan (X2); pengangguran (X3); kepadatan penduduk (X4); dan tingkat kriminalitas (Y) di Indonesia per provinsi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Sampel penelitian ini adalah data dari 34 provinsi, sehingga metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel total. Data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tabel silang, dan dianalisis menggunakan perhitungan korelasi product moment. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono & Isnania, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis faktor-faktor penentu yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022, dengan merujuk pada tabel korelasi yang mencakup beberapa variabel, yaitu kemiskinan, rata-rata pendapatan, pengangguran, dan kepadatan penduduk. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Tingkat Kriminalitas

Kriminalitas	Frekuensi	Persen
Rendah	10	29.4
Sedang	12	35.3
Tinggi	12	35.3
Total	34	100.0

Tabel 1 menunjukkan tingkat kriminalitas dari 34 provinsi di Indonesia yaitu 35,3% atau 12 provinsi pada tingkat tinggi, 35,3% atau 12 provinsi berada pada tingkat sedang, dan 29,4% atau 10 provinsi lainnya berada pada tingkat rendah. 12 provinsi dengan tingkat kriminalitas tinggi adalah Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan 12 provinsi dengan tingkat kriminalitas sedang adalah Sumatera Barat, Jambi, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Papua. 10 provinsi lainnya dengan tingkat kriminalitas rendah adalah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi adalah Jawa Timur yaitu kurang lebih mencapai 51.905 kasus. Hal ini dapat disebabkan jumlah populasi wilayah Jawa Timur yang cukup tinggi, yakni menurut BPS tahun 2022 sebanyak 40.921.100 jiwa. Populasi yang besar dapat menciptakan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan keamanan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindak kriminal. Selain itu, penelitian Nisyak dkk., (2023) menunjukkan bahwa Surabaya sebagai kota besar dan pusat ekonomi, sehingga menjadi tujuan urbanisasi bagi penduduk dari daerah pedesaan. Proses urbanisasi ini meningkatkan jumlah penduduk yang terkonsentrasi di kota besar, yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial. Apabila tidak dikelola dengan baik kesenjangan ini dapat memicu ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan penduduk, yang dalam beberapa kasus bisa menyebabkan pada peningkatan angka kriminalitas. Di sisi lain, tingkat kriminalitas terendah terdapat di Maluku Utara, dengan total 1.220 kasus. Rendahnya jumlah kriminalitas di daerah ini bisa dilihat dengan jumlah populasi yang relatif sedikit. Selain itu, masyarakat Maluku Utara juga masih menjunjung tinggi nilai budaya dan sosial yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Sesuai dengan berita yang ditulis Nadhiroh (2023), menyatakan bahwa masyarakat di Maluku Utara dapat leluasa menaruh barang yang dimiliki, tanpa khawatir akan kehilangan barang tersebut. Adanya kriminalitas tersebut, salah satunya dipicu faktor ekonomi, yaitu kemiskinan.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan	Frekuensi	Persen
Rendah	20	58.8
Sedang	10	29.4
Tinggi	4	11.8
Total	34	100.0

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 58,8% atau 20 provinsi berada pada tingkat rendah, 29,4% atau 10 provinsi berada pada tingkat sedang, dan sebanyak 11,8% atau 4 provinsi berada pada tingkat tinggi. Provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah yaitu Provinsi Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi dengan kemiskinan sedang yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Bengkulu, NTB, Aceh, Gorontalo, dan Maluku. Provinsi dengan kemiskinan tinggi yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Lampung, dan Papua Barat.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Rata-rata Pendapatan

Rata-rata Pendapatan	Frekuensi	Persen
Rendah	8	23.5
Sedang	12	35.3
Tinggi	14	41.2
Total	34	100.0

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas rata-rata pendapatan berada di kategori tinggi yaitu sebanyak 14 provinsi atau 41.2%. Sementara, untuk kategori sedang sebanyak 12 provinsi atau 35.3%, dan provinsi dengan pengangguran rendah sebanyak 8 provinsi atau 23.5%. Terdapat 8 provinsi yang berada pada kategori rata-rata pendapatan rendah yaitu provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT dan Sulawesi Tengah. Pada kategori sedang terdapat 12 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Sementara untuk rata-rata pendapatan kategori tinggi terdapat 14 provinsi yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengangguran

Pengangguran	Frekuensi	Persen
Rendah	10	29.4
Sedang	11	32.4
Tinggi	13	38.2
Total	34	100.0

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran pada kategori tinggi yaitu sebanyak 13 provinsi atau sebesar 38,2%. Sementara untuk kategori sedang sebanyak 11 provinsi atau sebesar 32,4%, dan provinsi yang memiliki pengangguran sedikit pada kategori rendah sebesar 10 provinsi atau sebesar 29,4%. Terdapat 10 provinsi yang termasuk dalam kategori rendah yakni provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua. Pada kategori sedang, terdapat 11 provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, kategori pengangguran tinggi mencatat 13 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat.

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk	Frekuensi	Persen
Rendah	10	29.4
Sedang	10	29.4
Tinggi	14	41.2
Total	34	100.0

Tabel 5 distribusi frekuensi kepadatan penduduk di atas Tingkat kepadatan penduduk pada kategori tinggi yaitu sebanyak 14 provinsi atau sebesar 41,2%, kemudian untuk kategori sedang sebanyak 10 provinsi atau sebesar 29,4% dan untuk kategori rendah sebanyak 10 provinsi atau sebesar 29,4%. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, terdapat 14 provinsi dengan kategori tinggi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara. Pada kategori sedang terdapat 10 provinsi yaitu Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat. Kemudian pada kategori rendah terdapat 10 provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua.

Tabel 6 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Tingkat Kriminalitas

Kemiskinan	Kriminalitas			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	5 25.0%	7 35.0%	8 40.0%	100%
Sedang	5 50.0%	2 20.0%	3 30.0%	100%
Tinggi	0 0.0%	3 75.0%	1 25.0%	100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas rendah mayoritas berada pada kemiskinan sedang sebesar 50%, tingkat kriminalitas sedang mayoritas berada pada kemiskinan tinggi sebesar 75%, dan tingkat kriminalitas tinggi mayoritas berada pada kemiskinan rendah sebesar 40%. Nilai hubungan tingkat kemiskinan dengan kriminalitas sebesar -0.113 yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan kriminalitas memiliki pengaruh negatif dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.523.

Tabel 7 Hubungan Tingkat Rata-rata Pendapatan dengan Tingkat Kriminalitas

Rata-rata Pendapatan	Kriminalitas			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	12 12.5%	3 37.5%	4 50.0%	100%
Sedang	5 41.7%	5 41.7%	2 16.7%	100%
Tinggi	4 28.6%	4 28.6%	6 42.9%	100%

Tabel 7 menunjukkan bahwa kriminalitas rendah mayoritas memiliki rata-rata pendapatan sedang yaitu sebesar 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan sedang cenderung memberikan stabilitas ekonomi yang mengurangi potensi tindak kriminal. Kriminalitas sedang mayoritas memiliki rata-rata pendapatan sedang yaitu sebesar 41,7%. Hal ini menunjukkan walaupun pendapatan pada suatu provinsi cenderung cukup atau berada di kategori sedang, tetapi masih memungkinkan seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Pada kategori kriminalitas tinggi mayoritas memiliki rata-rata pendapatan rendah yaitu sebesar 50.0%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rendahnya pendapatan di suatu provinsi, maka akan mendorong seseorang melakukan tindak kriminalitas. Nilai hubungan rata-rata pendapatan dengan kriminalitas sebesar -0.120 yang memiliki pengaruh negatif dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.500.

Tabel 8 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kriminalitas

Pengangguran	Kriminalitas			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	5 50.0%	4 40.0%	1 10.0%	100%
Sedang	3 27.3%	4 36.4%	4 36.4%	100%
Tinggi	2 15.4%	4 30.4%	7 53.8%	100%

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa pada kategori kriminalitas rendah, sebanyak 50.0% provinsi berada pada kategori pengangguran rendah, yang menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki kriminalitas yang lebih terkendali. Untuk kategori kriminalitas sedang, sebanyak 40.0% provinsi berada pada kategori pengangguran rendah, yang mencerminkan bahwa provinsi dengan pengangguran rendah juga dapat memiliki kriminalitas kategori sedang. Sementara itu, pada kategori kriminalitas tinggi, mayoritas sebesar 53.8% wilayah memiliki pengangguran tinggi, menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi lebih rentan terhadap tingginya tingkat kriminalitas. Nilai hubungan pengangguran dengan kriminalitas sebesar 0.337 yang memiliki hubungan positif dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0.051.

Tabel 9 Hubungan Tingkat Kepadatan Penduduk dengan Tingkat Kriminalitas

Kepadatan Penduduk	Kriminalitas			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Rendah	4 40.0%	4 40.0%	2 20.0%	100%
Sedang	4 40.0%	4 40.0%	2 20.0%	100%
Tinggi	2 14.3%	4 28.6%	8 57.1%	100%

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa kategori kriminalitas rendah, sebanyak 40% provinsi berada di kategori kepadatan penduduk rendah. Kategori kriminalitas sedang, sebanyak 40.0% provinsi berada di kategori kepadatan penduduk rendah. Untuk kategori kriminalitas tinggi sebanyak 57.1% memiliki kepadatan penduduk tinggi. Nilai hubungan kepadatan penduduk dengan kriminalitas sebesar 0.357 yang memiliki arah hubungan yang positif dengan nilai signifikansi p-value 0.038.

Berdasarkan beberapa tabel sebelumnya, kriminalitas di Indonesia pada tahun 2022 hanya signifikan pada variabel kepadatan penduduk. Pada hubungan tingkat kemiskinan dengan kriminalitas menunjukkan bahwa kemiskinan dan kriminalitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar -0.113. Artinya meskipun ada hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas, beberapa studi menunjukkan

bahwa pengaruhnya tidak selalu signifikan. Hasil penelitian Fadilla (2018) menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak terintegrasi dapat mengakibatkan dampak yang tidak signifikan terhadap pengurangan tingkat kriminalitas. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra (2023) yang menyatakan bahwa meskipun ada hubungan antara tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas, pengaruhnya tidak selalu signifikan. Secara keseluruhan, meskipun kemiskinan dan kriminalitas memiliki hubungan yang kompleks, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Upaya untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan secara holistik, dengan memperhatikan pendidikan, lapangan kerja, dan kebijakan sosial yang lebih luas untuk mengurangi risiko kriminalitas di masyarakat.

Provinsi Lampung, NTT, Papua, dan Papua Barat merupakan empat provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2022, yang dapat dijelaskan melalui berbagai faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di daerah-daerah ini dipengaruhi rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, serta ketidakmerataan pembangunan yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia (Hasanah & Sofro, 2022). Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Papua dan Papua Barat, misalnya, memiliki indikator kesehatan dan pendidikan yang sangat rendah, yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan (Novalina & Yuniasih, 2022). Di NTT, meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar, masih terdapat tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Pangestu, 2020).

Di Papua Barat, tingkat pengangguran yang tinggi berkontribusi pada kemiskinan yang meluas, di mana banyak individu tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak. Hal ini diperparah ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja. Di NTT dan Lampung, meskipun potensi ekonomi, seperti pertanian dan pariwisata, ketidakmampuan untuk memanfaatkan sumber daya ini secara optimal menyebabkan banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan (Harianja & Findi, 2020). Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat menyebabkan kesulitan dalam distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya turut membantu kondisi kemiskinan (Syahputri & Fisabilillah, 2023). Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam menangani permasalahan kemiskinan di daerah-daerah ini juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak program bantuan sosial dan pembangunan yang tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, atau tidak dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal yang spesifik (Purba

dkk., 2022). Hal ini menciptakan keselarasan dalam upaya pengentasan kemiskinan, di mana bantuan tidak sampai kepada mereka yang paling rentan (Irawati, 2023). Upaya untuk mengatasi kemiskinan harus melibatkan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan (Rukmana, 2023).

Berdasarkan data profil kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 (BPS, 2022a) dari 34 provinsi yang diteliti, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%, naik menjadi 7,53% pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2022 sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022. Meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit, kualitas hidup mereka sering kali terancam oleh masalah lingkungan yang lebih serius. Hasil penelitian Ridena (2020) menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah perkotaan berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih rendah, tantangan yang dihadapi mereka berbeda dan sering kali lebih kompleks. Secara keseluruhan, meskipun urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan dapat mengurangi angka kemiskinan, tantangan struktural di pedesaan tetap menjadi masalah yang signifikan.

Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah adalah provinsi dengan rata-rata pendapatan kategori rendah pada tahun 2022. Hal ini tentu dapat dijelaskan melalui berbagai sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki rata-rata pendapatan Rp 1.812.935, dan merupakan provinsi terendah se-Indonesia. Sementara untuk provinsi dengan tingkat pendapatan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854,00. Kesenjangan pendapatan antara kedua provinsi tersebut, dikarenakan adanya perbedaan nilai pendapatan antara pekerja dengan pendapatan rendah terhadap pekerja dengan penghasilan rata-rata. Masih banyak pula wilayah yang nilai pendapatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Berdasarkan penelitian Sahal (2023) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia dapat berpengaruh pada rata-rata pendapatan di suatu provinsi. Ketika kualitas sumber daya manusia meningkat, maka pendapatan pada suatu daerah pun meningkat dan ketimpangan pendapatan juga berkurang. Hal ini dikarenakan, seseorang dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka dalam dunia kerja akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan posisi yang tinggi. Tentunya pendapatan yang diberikan juga semakin tinggi.

Rata-rata pendapatan tidak memiliki hubungan dengan kriminalitas dan memiliki arah hubungan negatif. Artinya semakin tinggi rata-rata pendapatan suatu daerah,

maka akan semakin rendah tingkat kriminalitas begitu juga sebaliknya, semakin rendah rata-rata pendapatan suatu daerah, maka akan semakin tinggi tingkat kriminalitas masyarakatnya. Penelitian yang dilakukan Pare & Felson dalam Andressony (2024), menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketimpangan pendapatan di suatu daerah dengan semua jenis viktimisasi kejahatan. Hal ini disebabkan pendapatan yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan individu, sehingga keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara kriminal semakin tinggi.

Pengangguran tidak berhubungan dengan kriminalitas, hal ini dikarenakan hasil uji menyatakan bahwa $p > 0,051$. Sehingga dapat diketahui bahwa pengangguran tidak berhubungan secara langsung dengan kriminalitas, namun terdapat faktor lain yang menjadi penyebabnya salah satunya yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang rendah, mereka cenderung memiliki keterampilan yang terbatas, sehingga mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat memicu seseorang frustrasi dan mendorong untuk terlibat dalam tindak kriminalitas. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas, dapat dilihat melalui data yang menunjukkan sebesar 0,337. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kriminalitas. Begitu pula sebaliknya, ketika semakin rendah tingkat pengangguran, maka akan semakin rendah pula tingkat kriminalitas. Penelitian yang dilakukan Mervita, dkk., (2022), juga menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak signifikan dengan kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara periode 2012-2021. Secara sosiologis, ketika dikaitkan dengan teori konflik Max Weber, adanya pengangguran dapat menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga individu melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk reaksi adanya ketidakadilan tersebut.

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat merupakan 13 provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi pada tahun 2022. Hal ini tentu dapat dijelaskan melalui berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan dan sosial. Menurut Leonard, dkk., (2022), menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya angka pengangguran yaitu adanya inflasi. Menurut data BPS Provinsi DKI Jakarta, pada Desember 2022 inflasi mengalami peningkatan. Inflasi pada periode ini didorong beberapa komoditas utama, yaitu bensin, bahan bakar rumah tangga, dan kontrak rumah. Peningkatan harga bensin memengaruhi biaya transportasi yang lebih tinggi, baik untuk angkutan pribadi maupun umum, yang mengarah pada inflasi di sektor transportasi. Hal ini sering kali menyebabkan biaya barang dan jasa lainnya meningkat, karena biaya transportasi yang lebih tinggi akan memengaruhi harga barang yang didistribusikan. Sementara itu, lonjakan harga bahan bakar rumah

tangga, seperti gas dan listrik, memperburuk biaya hidup rumah tangga. Begitu pula, kenaikan biaya kontrak rumah atau sewa tempat tinggal berkontribusi terhadap inflasi pada sektor perumahan, yang membuat biaya hidup semakin mahal, terutama di daerah perkotaan.

Penelitian yang dilakukan Ningsi (2023), menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka pengangguran pada provinsi Aceh yaitu rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja berkontribusi pada tingginya angka pengangguran, di mana banyak individu tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dapat mencerminkan kurangnya akses atau kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam pasar kerja secara aktif. Hal ini sering kali disebabkan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, atau bisa juga karena ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan kualifikasi yang dimiliki pencari kerja. Apabila terdapat sektor-sektor yang belum berkembang pesat, hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya jumlah pekerjaan yang tersedia untuk menampung angkatan kerja yang ada. Selain itu, faktor pendidikan yang belum optimal dan rendahnya akses pelatihan kerja juga memperburuk ketidaksesuaian tersebut. Akibatnya, meskipun ada banyak individu yang ingin bekerja, mereka tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja, yang akhirnya meningkatkan angka pengangguran di provinsi tersebut.

Pengangguran dapat disebabkan angka kepadatan penduduk di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu kurang lebih mencapai 16044.96 penduduk. Hal ini disebabkan jumlah pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2022, yakni menurut BPS Kota Jakarta Utara (2023) sebanyak 0.38% dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ini dipicu faktor migrasi, urbanisasi dan tingkat kelahiran yang relatif tinggi di ibu kota. Jakarta menjadi tujuan utama bagi banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik, tingginya tingkat urbanisasi tanpa diimbangi dengan perluasan wilayah administratif menyebabkan kepadatan terus meningkat. Kemudian provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk sedang adalah Kep. Bangka Belitung yaitu sebanyak 88,18 penduduk. Kepadatan penduduk yang sedang di Kepulauan Bangka Belitung ini mencerminkan keseimbangan antara kehidupan perkotaan dan pedesaan, meskipun ada tantangan terkait infrastruktur dan layanan publik provinsi ini memiliki potensi untuk mengelola pertumbuhan penduduk dengan baik melalui kebijakan yang tepat dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Sementara itu, provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk rendah adalah Kalimantan Utara dikarenakan memiliki luas wilayah yang besar dibandingkan jumlah penduduk yang relatif sedikit menyebabkan kepadatan menjadi rendah. Selain itu, faktor geografis dan aksesibilitas yang cenderung dekat dengan hutan dan daerah terpencil membuat

aksesibilitas menjadi lebih sulit yang mengakibatkan kurangnya pengembangan infrastruktur sehingga tidak banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Pada penelitian ini, kepadatan penduduk memiliki hubungan dengan kriminalitas. Kepadatan penduduk dapat terjadi jika jumlah penduduk di suatu wilayah semakin bertambah. Akibat kepadatan penduduk tersebut, infrastruktur dan layanan publik yang tersedia pun semakin tidak cukup untuk menampung jumlah penduduk. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia pun semakin lama menjadi semakin terbatas, akibat dari jumlah penduduk yang melebihi jumlah lapangan pekerjaan tersedia. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tersebut telah membuat persaingan antar masyarakat dalam bidang pekerjaan menjadi semakin ketat. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan, karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak dan malah mendapatkan upah yang sangat rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mubarok (2024) yang meneliti dampak sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di 13 kota besar di Indonesia, dan menemukan bahwa kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kriminalitas di daerah perkotaan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika kepadatan penduduk meningkat, tingkat kriminalitas cenderung ikut meningkat. Kepadatan penduduk memiliki arah hubungan yang positif, namun memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kepadatan penduduk meningkat, angka kriminalitas cenderung naik. Secara sosiologis, hal ini dapat diartikan, saat kepadatan penduduk meningkat, maka persaingan antar masyarakatnya juga ikut meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Pengaruh yang tidak signifikan ini menunjukkan adanya faktor lain yang juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kriminalitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Edwart (dalam Herpandi, 2017), pertumbuhan jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin dan nantinya memiliki hubungan positif yang sangat tinggi dengan jumlah kriminalitas yang ada.

Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan dan pengangguran tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kriminalitas. Korelasi antara rata-rata pendapatan dengan kriminalitas memiliki nilai $-0,120$ dengan nilai signifikansi $0,500$, sedangkan korelasi antara pengangguran dengan kriminalitas adalah $0,337$ dengan signifikansi $0,051$. Nilai signifikansi untuk kedua variabel ini lebih dari $0,05$. Penelitian Sabiq dan Apsari (2021) menunjukkan bahwa meskipun pengangguran sering diasosiasikan dengan tindakan kriminal, analisis mereka menunjukkan bahwa pengangguran tidak selalu menjadi penyebab langsung dari peningkatan kriminalitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat satu variabel yang berhubungan dengan tingkat kriminalitas, yaitu kepadatan penduduk, serta terdapat tiga variabel yang tidak berhubungan dengan tingkat kriminalitas yaitu kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran. Variabel kepadatan penduduk memiliki hubungan korelasi dengan tingkat kriminalitas dan memiliki arah hubungan positif dikarenakan kepadatan penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti terbatasnya infrastruktur dan layanan publik, minimnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya persaingan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kepadatan penduduk, maka tingkat kriminalitas meningkat. Sementara itu, tiga variabel lainnya yaitu kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran tidak berkorelasi dengan tingkat kriminalitas karena variabel-variabel tersebut tidak secara langsung memengaruhi tingkat kriminalitas. Kemiskinan, rata-rata pendapatan, dan pengangguran mungkin dipengaruhi faktor-faktor lain yang lebih kompleks dan tidak selalu berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa variabel-variabel ini memiliki dampak tidak langsung atau diperantarai faktor-faktor lain, sehingga tidak menunjukkan hubungan korelasi yang signifikan dengan tingkat kriminalitas dalam hasil penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang lebih nyata terhadap tingkat kriminalitas dibandingkan variabel lainnya dalam konteks yang diteliti.

Referensi

- Aldawiyah, N. (2024). Analisis Faktor Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Regresi Komponen Utama. *Variance Journal of Statistics and Its Applications*, 6(1), 63-74. <https://doi.org/10.30598/variancevol6iss1page63-74>
- Andressony, D. (2024). Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Borjuis: Journal of Economy*, 2(3), 101-115. <https://borjuis.joln.org/index.php/home/article/view/37>
- Aprilia, B. (2022). Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Tindakan Kriminalitas Di Desa Parengan. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 348-354). <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/77/62/250>
- Azmi, K. N., Azzahra, S. P., Dewi, V. K., & Pertiwi, Y. W. (2024). Analisis Pengangguran terhadap Tindakan Kriminalitas di Kota Bekasi. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 223-234.. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.497>

- BPS Indonesia. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Diakses pada 2 Januari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>
- BPS Kota Jakarta Utara. (2023). *Akhir Tahun 2022, Inflasi Jakarta Kembali Meningkatkan*. Diakses pada 2 Januari 2025, dari <https://jakutkota.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/05/392/akhir-tahun-2022--inflasi-jakarta-kembali-meningkat.html>
- BPS. (2022a). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. Diakses pada 2 Januari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- BPS. (2022b). *Statistik Kriminal 2022*. Diakses pada 3 Januari 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>
- Dari, S. W., & Asnidar, A. (2022). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas. *Niagawan*, 11(1), 68-79. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32242>
- Diskominfo. (2022). Pemprov Kenalkan Tiga Sektor Prioritas Kaltara. Diakses pada 5 November 2024 dari <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pemprov-kenalkan-tiga-sektor-prioritas-kaltara/>
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas di Kota Bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 36-57. <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2770>
- Edwart, A. O., & Azhar, Z. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7703>
- Fadilla, A. (2018). Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten. *Eqien Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 38-47. <https://doi.org/10.34308/eqien.v4i2.46>
- Harianja, Y. & Findi, M. (2020). Tingkat Kemiskinan di Pulau Papua Tahun 2011-2017. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 189-200. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.189-200>
- Hasanah, I. and Sofro, A. (2022). Analisis Cluster Berdasarkan Dampak Ekonomi di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19. *Mathunesa Jurnal Ilmiah Matematika*, 10(2), 239-248. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v10n2.p239-248>
- Herpandi, W. D. (2017). *Pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas di Kota Medan* (Doctoral dissertation). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/935>
- Ibraya, N. S., & Azis, F. (2023). Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 2(2), 24-29. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>

- Irawati, M. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linier (Studi Kasus: Kota Salatiga). *Jurnal Emt Kita*, 7(2), 401-408. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1013>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh Urbanisasi, Tingkat Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1-9. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Lapebesi, R. A., Pramesti, E. N., Ahyandi, M. N., Sari, M. T., & Yuhan, R. J. (2021). Analisis Jalur Faktor-Faktor yang Memengaruhi Jumlah Kriminalitas di Jawa Timur Tahun 2020. *Jurnal Sains Matematika dan Statistika*, 7(2), 38-49. <https://dx.doi.org/10.24014/jsms.v7i2.13381>
- Leonard, L., Lionel, E., Ong, T., & Fernando, N. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi pada DKI Jakarta. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(4), 172-180. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i4.420>
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas di Indonesia?. *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 5(1), 19. <http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v5i1.554>
- Martauli, E., Karo, S., Sembiring, S., & Sembiring, R. (2022). Pengaruh Sosial Ekonomi terhadap PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan Sumatera Utara. *Agrifor*, 21(2), 283. <https://doi.org/10.31293/agrifor.v21i2.6157>
- Martono, N., & Isnania, R. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mervita, E., Eviatun, E., Hasan, S., Hasanuddin, H., & Sari, R. R. (2022). Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Tindakan Kriminal di Kabupaten Lampung Utara Periode 2012-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 665-672. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.2206>
- Mubarok, M. (2024). Analisis Dampak Indikator Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas pada 13 Kota Besar di Indonesia Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 101-117. <https://doi.org/10.23969/jrie.v3i2.68>
- Nadhiroh, R. (2023). Maluku Utara, Salah Satu Provinsi Terbahagia di Indonesia. Diakses pada 5 November 2024 dari <https://news.uad.ac.id/maluku-utara-salah-satu-provinsi-terbahagia-di-indonesia/>
- Ningsi, M. N. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34449/>
- Nisyak, I. Q., Handoyo, P., dan Harianto, S. (2023). Kesenjangan Sosial Masyarakat Urban di Balik Pembangunan Infrastruktur Kota (Studi di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya). *Sosio e-Kons*, 15(2). <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17769>

- Novalina, R. and Yuniasih, A. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi Anak di Pulau Papua Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 313-322. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1398>
- Nur, I. & Rakhman, M.T. (2019). Analisis PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi DKI Jakarta. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 4(4). <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.132>
- Padilla, M. A. E., (2022). Kriminalitas dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Diakses pada 9 September 2024 dari <https://unair.ac.id/kriminalitas-dan-ketimpangan-pendapatan-di-indonesia/>
- Pangestu, I. (2020). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62-74. <https://doi.org/10.29244/jekp.8.1.2019.62-74>
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62-74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Ridena, S. (2020). Kemiskinan dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 39-48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- Rukmana, S. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pendapatan Asli Daerah, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2002-2021. *Kaganga Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 6(2), 826-833. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7342>
- Sabiq, R. and Apsari, N. (2021). Dampak Pengangguran terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Tindakan Kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161-167. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Sahal, A. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2017-2021 (Skripsi)*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47352>
- Saputra, R. (2023). Analisis Tingkat Pendidikan, Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 3(4), 159-163. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i4.1677>
- Syahputri, R. and Fisabilillah, L. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Independent Journal of Economics*, 2(2), 169-184. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50990>
- UNODC. (2015). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0 <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html>

Yuzani, D. A., & Deswina, L. F. (2024). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 165-173. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1526>